

2016

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI INSTALASI KARANTINA IKAN DAN SERTIFIKASI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB)



**PUSAT KARANTINA DAN KEAMANAN HAYATI IKAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan (Puskari) dapat menyelesaikan penyusunan Standar Pelayanan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi Puskari dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam pelaksanaan pelayanan terkait pelayanan kepada masyarakat pengguna (*government to citizen*) dalam penerbitan Sertifikat IKI dan Sertifikat CKIB.

Sistematika penyusunan dokumen Standar Pelayanan ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan lampiran yang menjadi satu kesatuan sebagai Keputusan Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan. **Bagian kesatu** dokumen ini berisi Kata Pengantar. **Bagian kedua** berisi Keputusan Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan tentang Standar Pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB. **Bagian ketiga** memuat Lampiran Keputusan Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati tentang Standar Sertifikasi Pelayanan IKI dan Sertifikasi CKIB yang terdiri dari enam bab, yang meliputi BAB I : Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup Standar Pelayanan. BAB II : Visi, Misi, Moto dan Maklumat Pelayanan. BAB III : Standar Pelayanan, yang berisi dasar hukum, produk layanan, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif layanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, jumlah pelaksana, pengawas internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jaminan layanan, keamanan, dan keselamatan, dan evaluasi kinerja pelaksana, BAB IV : Monitoring dan Evaluasi. BAB V : Pengertian Umum dan BAB VI : Penutup.

Penyusunan Standar Pelayanan Publik ini merupakan wujud kesungguhan Puskari dan UPT BKIPM dalam menerapkan prinsip *good and clean governance*.

Oleh karena itu, dengan disusun dan ditetapkannya Standar Pelayanan ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskari dan UPT BKIPM menjadi lebih fokus, efektif, efisien, profesional, dan akuntabel dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepala pusat karantina
Dan keamanan hayati ikan,

Riza Priyatna

DAFTAR ISI

BAGIAN KESATU :

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v

BAGIAN KEDUA :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KARANTINA DAN KEAMANAN HAYATI IKAN TENTANG SERTIFIKASI IKI DAN SERTIFIKASI CKIB.....	vi
---	----

BAGIAN KETIGA : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKARI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Maksud dan tujuan.....	2
1.3 Sasaran.....	2
1.4 Ruang lingkup.....	2
BAB II VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN	4
2.1 Visi.....	4
2.2 Misi.....	4
2.3 Motto Pelayanan.....	4
2.4 Maklumat Pelayanan.....	5
BAB III STANDAR PELAYANAN.....	6
3.1 Dasar Hukum.....	6
3.2 Produk Pelayanan.....	7
3.3 Persyaratan	7
3.4 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	8
3.5 Jangka Waktu Penyelesaian	9
3.6 Biaya/ Tarif.....	9
3.7 Sarana, Prasarana dan/ Atau Fasilitas.....	9
3.8 Kompetensi dan Jumlah Pelaksana.....	10

3.9 Mekanisme Pengaduan, Saran dan Masukan	11
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN	13
4.1 Pengawasan dan Pembinaan.....	13
4.2 Evaluasi Kinerja Pelaksana.	13
BAB V PENGERTIAN UMUM	15
BAB VI PENUTUP	18
LAMPIRAN.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat IKI.....	19
Lampiran 2. Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat CKIB	21
Lampiran 3. Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat Cara Karantina Ikan Yang Baik	22
Lampiran 4. Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat Cara Karantina Ikan Yang Baik Kelas C.....	25

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KARANTINA DAN KEAMANAN HAYATI IKAN
/KEP-BKIPM.2/2016**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI)
DAN SERTIFIKASI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT KARANTINA DAN KEAMANAN HAYATI IKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas sebagaimana huruf b dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dan pencegahan keluarnya hama dan penyakit ikan tertentu sesuai persyaratan negara tujuan, perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, Standar Pelayanan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI) DAN SERTIFIKASI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB)
- KESATU : Standar Pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penjelasan yang termuat dalam lampiran keputusan adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dari Standar Pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan bagi setiap UPT BKIPM dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB harus dipahami, dilaksanakan dan disebarluaskan oleh seluruh pegawai di lingkungan UPT – BKIPM dan Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA PUSAT KARANTINA
DAN KEAMANAN HAYATI IKAN,

RIZA PRIYATNA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan pada saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang yang berimplikasi pada terjadinya transformasi nilai di masyarakat. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan yang optimal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM dan Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan (Puskari) merupakan unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh UPT BKIPM adalah pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dan pencegahan keluarnya hama dan penyakit ikan tertentu sesuai persyaratan negara tujuan. Kegiatan pelayanan ini diselenggarakan baik oleh UPT BKIPM, maupun Puskari.

Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan diimplementasikan mengharuskan setiap satuan kerja untuk lebih transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemberi layanan harus dapat memberikan informasi-informasi yang terkait pelayanan yang diberikan, meliputi dasar hukum pelayanan, jenis-jenis pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, biaya layanan, kompetensi petugas pemberi layanan serta yang terpenting adalah jaminan atau komitmen pemberi layanan bahwa pelayanan yang diberikan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB, Puskari memandang perlu dan berkomitmen untuk menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan suatu Standar Pelayanan dalam hal Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB. Standar Pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB adalah tolok ukur kinerja pelayanan oleh unit kerja di lingkungan BKIPM.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan, penetapan dan implementasi Standar Pelayanan dimaksudkan :

- a. Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB yang diselenggarakan oleh Puskari dan UPT BKIPM;
- b. Merupakan ketentuan tentang mutu layanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB yang diselenggarakan oleh Puskari dan UPT BKIPM.

Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa di setiap satuan kerja pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB terpenuhi kondisi minimal yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan yang memadai.

1.3. SASARAN

Sasaran Standar Pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB adalah :

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Puskari dan UPT BKIPM;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan/kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB ini meliputi dasar hukum penyelenggaraan pelayanan, produk pelayanan, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian dan biaya/ tarif pelayanan, sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas penunjang, kompetensi dan jumlah pelaksana,

pengawasan dan pembinaan, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan evaluasi kinerja Pelaksana.

Pelayanan Puskari dan UPT BKIPM sesuai tugas dan fungsinya adalah sertifikasi dan/atau rekomendasi di bidang karantina ikan yang antara lain terdiri dari :

- a. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan
- b. Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB)

BAB II

VISI, MISI, MOTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsinya, pelayanan publik dilingkup Puskari dan UPT BKIPM mengacu pada :

2.1. VISI

“Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan terpercaya”

VISI sebagaimana tersebut diatas bermakna :

Hasil perikanan mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Hasil perikanan yang sehat mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina dan hama penyakit ikan tertentu (sehat), serta memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (bermutu).

Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

2.2. MISI

“Mewujudkan Pencegahan Masuk dan Penyebaran HPIK serta Pencegahan Keluarnya HPI Tertentu yang Mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu dan Terpercaya”

2.3. MOTO PELAYANAN

- a. Tanggap;
- b. Santun;
- c. Cermat;
- d. Tegas;
- e. Adil.

2.4. MAKLUMAT PELAYANAN

Kewajiban dan janji pelayanan publik yang diberikan Puskari dan UPT BKIPM berpedoman pada kebijakan pimpinan sebagaimana tercermin dalam tugas dan fungsi Puskari dan UPT BKIPM. Maklumat pelayanan tidak ditujukan semata-mata untuk kepuasan *stakeholders*, akan tetapi lebih memperhatikan penerapan prinsip-prinsip pengembangan pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB secara transparan, penggunaan sistem pelayanan terpadu, penerapan perbaikan pelayanan yang berkelanjutan, dan pengambilan kebijakan pimpinan yang berbasis data dan fakta.

Selain berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, maklumat layanan publik dilingkungan Puskari dan UPT BKIPM juga memperhatikan prinsip-prinsip umum pelayanan publik, antara lain :

- a. Puskari dan UPT BKIPM menjamin ketersediaan sumber daya dan informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa;
- b. Puskari dan UPT BKIPM terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari masyarakat pengguna dalam rangka menjamin perbaikan kinerja yang berkelanjutan;
- c. Puskari dan UPT BKIPM lebih mengutamakan prinsip keadilan dan pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan publik, setiap stakeholder menerima pelayanan yang sama dan tidak diskriminatif;
- d. Puskari dan UPT BKIPM menjamin kepastian hukum terhadap data dan informasi yang diterima atau dikomunikasikan kepada publik. Untuk itu, mekanisme pelayanan publik dilakukan dengan pendekatan satu pintu, bukan melalui perorangan atau harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan;
- e. Dalam mewujudkan kecepatan dan ketepatan layanan, Puskari dan UPT BKIPM menggunakan pendekatan pelayanan sertifikasi secara elektronik.

BAB III

STANDAR PELAYANAN

3.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi pelayanan publik berdasarkan tugas fungsi dan tanggungjawab organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- 2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009.
- 3) UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4) PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
- 5) PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 6) PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dilingkungan Kementerian Kelautan Perikanan.
- 7) Permen KP No.05 Tahun 2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa HPIK.
- 8) Peraturan Menteri PAN No. PER/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
- 9) Permen KP No.PER.09 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan Hidup sebagai barang bawaan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 10) Permen KP No.20 Tahun 2007 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 11) Permen PAN No.13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
- 12) Permen KP No. 02 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 13) Permen KP No. 33 Tahun 2014 tentang Instalasi Karantina Ikan.

- 14) Kepmen PAN No.63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 15) Kepmen KP No. 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK.
- 16) Kepmen KP No. 80 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenis Jenis HPIK, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya.
- 17) Kepmen KP No. 81 Tahun 2015 tentang Penetapan Area yang Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina, Golongan Dan Media Pembawanya Di Dalam Wilayah Negara RI

3.2. PRODUK PELAYANAN

Produk pelayanan dilingkungan Puskari dan UPT BKIPM adalah sebagai :

- a. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan;
- b. Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB).

3.3. PERSYARATAN

Persyaratan untuk produk pelayanan sertifikasi IKI dan CKIB mengacu pada ketentuan peraturan perundangan sesuai dasar hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan
 - ✓ Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan
 - ✓ Fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, untuk pemohon Badan Hukum
 - ✓ Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - ✓ Surat keterangan dari Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan yang menjelaskan bahwa perorangan atau Bana Hukum tersebut melakukan usaha di bidang perikanan
 - ✓ Dokumen mutu karantina ikan
 - ✓ Sertifikat IKI terakhir untuk pemohon perpanjangan IKI
- b. Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik
 - ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan

- ✓ Fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan, untuk pemohon Badan Hukum
- ✓ Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- ✓ Surat keterangan dari Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan yang menjelaskan bahwa perorangan atau Badan Hukum tersebut melakukan usaha di bidang perikanan
- ✓ Dokumen mutu karantina ikan
- ✓ Sertifikat IKI
- ✓ Sertifikat CKIB terakhir untuk pemohon perpanjangan sertifikat CKIB

3.4. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Sistem pelayanan publik yang digunakan oleh Puskari dan UPT BKIPM adalah sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008.

Mekanisme pelayanan mengacu pada pedoman, petunjuk teknis (juknis), dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di masing – masing unit pelayanan.

Pelayanan sertifikasi IKI dan sertifikasi CKIB diselenggarakan di Puskari dan UPT BKIPM.

Pedoman, Juknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

pedoman, juknis, dan SOP dibuat untuk menghindari variasi tindakan yang tidak perlu dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar organisasi dapat berfungsi efektif dan efisien. Pada prespektif eksternal organisasi, pedoman, juknis dan SOP dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi. Sedangkan internal organisasi, pedoman, juknis dan SOP akan memperjelas persyaratan dan target pekerjaan serta memberikan informasi rinci berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam situasi yang dihadapi serta tetap sesuai dengan harapan/tujuan organisasi.

3.5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu penyelesaian pelayanan :

- a. Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI): 10 hari kerja
- b. Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) : 20 hari kerja

3.6. BIAYA/TARIF

Biaya/ tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa layanan produk di UPT BKIPM mengacu pada PP No. 75 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dilingkungan Kementerian Kelautan Perikanan. Rincian waktu penyelesaian pelayanan dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.

3.7. SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang digunakan dalam melakukan pelayanan publik dilingkup Puskari dan UPT - BKIPM meliputi :

- a. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)
 - ✓ Ruang/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan.
 - ✓ Sistem aplikasi pendukung pelayanan
 - ✓ Peralatan perkantoran.
 - ✓ Sumber Daya Manusia yang kompeten.
- b. Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB)
 - ✓ Ruang/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan.
 - ✓ Sistem aplikasi pendukung pelayanan
 - ✓ Instalasi Karantina Ikan
 - ✓ Laboratorium
 - ✓ Peralatan inspeksi berupa peralatan pengambil sampel
 - ✓ Peralatan perkantoran.
 - ✓ Sumber Daya Manusia yang kompeten.

3.8. KOMPETENSI DAN JUMLAH PELAKSANA

Kompetensi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Puskari dan UPT BKIPM terdiri dari 887 Fungsional PHPI yang terdiri dari Fungsional PHPI Terampil berjumlah 444 petugas dan Fungsional PHPI Ahli berjumlah 439 petugas. Berdasarkan pembagian tugas disetiap tahapan pelayanan, maka petugas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)

Kualifikasi jabatan yang memberikan pelayanan sertifikasi IKI sebagai berikut :

- ✓ Petugas Verifikasi Dokumen.
- ✓ Tim Penilai Instalasi Karantina Ikan (IKI).
- ✓ Petugas Administrasi.

Jumlah petugas yang memberikan pelayanan sertifikasi IKI pada masing-masing satuan kerja unit layanan sekitar 6 (enam) orang.

b. Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)

Kualifikasi jabatan yang memberikan pelayanan sertifikat CKIB sebagai berikut :

- ✓ Inspektur Karantina Ikan
- ✓ Petugas Pengambil Contoh
- ✓ PHPI pelaksana monitoring penerapan dokumen mutu dan surveilan HPIK/ HPI tertentu di UPT BKIPM
- ✓ Petugas Laboratorium
- ✓ Petugas Administrasi.

Jumlah petugas yang memberikan pelayanan sertifikat CKIB pada masing masing satuan kerja unit layanan sekitar 6 (enam) orang.

3.9. MEKANISME PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Puskari dan UPT BKIPM mempunyai mekanisme pengaduan, saran dan masukan. Masyarakat sebagai penerima pelayanan publik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. Mendapat perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan;

- d. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- e. Memberitahukan kepada Penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Melakukan pengaduan atas pelayanan publik yang tidak sesuai atau menyimpang dari standar pelayanan;
- h. Mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan.

Pengaduan dapat diajukan oleh setiap penerima layanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dilayani, sedangkan tanggapan terhadap pengaduan tersebut dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pengaduan. Pengaduan disampaikan secara tertulis, dengan memuat :

- a. Identitas lengkap pengadu;
- b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita;
- c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
- d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. Pengaduan dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduan. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak Penyelenggara.

Pengelolaan pengaduan pada layanan lingkup Puskari dan UPT – BKIPM dalam dua bentuk :

- a. Dalam bentuk elektronik, meliputi telepon, SMS, chat, website, email yang dapat disampaikan melalui Puskari dan UPT BKIPM
- b. Dalam bentuk konvensional, meliputi datang langsung, bersurat dan/atau mengisi formulir pengaduan kemudian menyerahkan kepada petugas penerima layanan pengaduan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN

4.1. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Puskari melakukan pembinaan teknis atas penerapan Standar Pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB yang dilaksanakan UPT BKIPM.

Kepala Puskari dan kepada UPT BKIPM melakukan pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di masing-masing UPT BKIPM dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Badan melalui Kepala Puskari.

4.2. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksana pelayanan Sertifikasi IKI dan Sertifikasi CKIB terdiri dari pejabat dan/atau pegawai di Puskari dan UPT -BKIPM yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.

Dalam pemberian pelayanan, pelaksana layanan memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya; menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kewajiban yang diembankan kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan; memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang; memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan sertifikasi IKI dan sertifikasi CKIB Puskari dan UPT BKIPM dilakukan melalui penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sendiri bersama dengan pihak terkait yang

ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan mekanisme penilaian tertentu. BKIPM melalui Kepala Puskari menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan standar pelayanan minimal sertifikasi IKI dan sertifikasi CKIB.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui komitmen pelaksana layanan dalam mendukung keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan. Jika hasil evaluasi menyatakan terdapat kekurangan sesuai Standar Pelayanan, maka Puskari dan UPT BKIPM harus menindaklanjuti sehingga penerapan standar pelayanan minimal dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana layanan sertifikasi IKI dan sertifikasi CKIB dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Standar Pelayanan Karantina Ikan.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi meliputi :

- a) Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik sekurang - kurangnya 1 tahun sekali; Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil evaluasi dengan rumusan Standar Pelayanan untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan kinerja pelaksana pelayanan;
- b) Evaluasi harus melibatkan para *stakeholder*, khususnya penerima layanan;
- c) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan minimal sertifikasi IKI dan sertifikasi CKIB sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB V

PENGERTIAN UMUM

Dalam Standar Pelayanan sertifikasi IKI dan sertifikasi CKIB ini yang dimaksud dengan :

- 1) Standar Pelayanan Sertifikasi IKI dan CKIB adalah tolok ukur kinerja pelayanan sertifikasi IKI dan CKIB yang diselenggarakan oleh Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan dan UPT BKIPM
- 2) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- 3) Unit Pelaksana Teknis KIPM adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 4) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) adalah surat penetapan yang menyatakan instalasi karantina telah memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan karantina ikan.
- 5) Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah surat penetapan yang menyatakan Instalasi Karantina Ikan yang ditetapkan telah menerapkan CKIB secara konsisten.
- 6) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- 7) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
- 8) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga

independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;

- 9) Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
- 10) Masyarakat pengguna adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 11) Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, atau pun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 12) Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat;
- 13) Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik;
- 14) Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 15) Jangka waktu penyelesaian adalah adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 16) Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;

- 17) Biaya atau tarif adalah besaran dana pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif;
- 18) Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 19) Sarana, prasarana, dan atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan;
- 20) Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki para pelaksana pelayanan yang meliputi keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku;
- 21) Pengawasan internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja untuk mengendalikan proses, pelaksanaan, dan hasil/produk penyelenggaraan pelayanan publik;
- 22) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut terhadap ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada instansi/lembaga atau masyarakat pengguna;
- 23) Jaminan pelayanan adalah yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik;
- 24) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko keraguan dan kepastian untuk memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya;
- 25) Evaluasi kinerja pelaksana adalah hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri dan/ atau bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu;

BAB VI

PENUTUP

Standar Pelayanan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan dan Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi IKI dan CKIB dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan, serta pencegahan keluarnya HPI tertentu sesuai persyaratan negara tujuan yang bermutu. Standar pelayanan minimal sertifikasi IKI dan CKIB adalah kriteria minimal tentang sistem penerapan jaminan kesehatan ikan di seluruh UPT BKIPM.

Puskari menentukan kebijakan dan Standar Pelayanan tersebut untuk menjamin kesehatan ikan nasional. Pengelolaan pelaksanaan sertifikasi IKI dan CKIB di Puskari atau UPT BKIPM dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan dengan prinsip manajemen berbasis UPT. Puskari dan UPT BKIPM wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan sertifikasi IKI dan CKIB yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas SPM tersebut.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Kelas A dan B

No.	Uraian	Waktu	Hari kerja
1.	Penerimaan permohonan, dokumen persyaratan administrasi dan registrasi.	15 menit	1
2.	Surat permohonan dan dokumen persyaratan administrasi diterima dan disposisi.	5 menit	1
3.	Penerbitan Surat Perintah verifikasi kelengkapan, kesesuaian, keabsahan dokumen yang dipersyaratkan, analisis dan evaluasi dokumen mutu karantina ikan serta penyampaian ke Petugas Verifikasi/ PHPI.	10 menit	1
4.	Pelaksanaan verifikasi kelengkapan, kesesuaian, keabsahan dokumen yang dipersyaratkan, analisis dan evaluasi dokumen mutu karantina ikan serta penerbitan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta rekomendasinya.	120 menit	2
5.	Penerbitan Surat Perintah Penilaian IKI dan penyampaian ke PHPI.	5 menit	2
6.	Pelaksanaan penilaian IKI dan penerbitan laporan hasil penilaian (LHP).	480 menit	3-4
7.	Penyampaian LHP oleh Tim Penilai	5 menit	5
8.	Penerbitan Rekomendasi Hasil Penilaian IKI oleh Kepala UPT BKIPM	10 menit	5
9.	Penyampaian hasil rekomendasi penilaian IKI (untuk IKI kelas A dan B) kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat (melalui fasilitas elektronik)	10 menit	6
10.	Penerbitan Surat Perintah Verifikasi Rekomendasi Penilaian IKI dan penyampaian ke petugas verifikasi/PHPI.	5 menit	6

No.	Uraian	Waktu	Hari kerja
11.	Pelaksanaan Verifikasi Rekomendasi Penilaian IKI serta penerbitan Laporan Hasil Verifikasi (LHV).	15 menit	6
12.	Penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan kelas A atau B	60 menit	7-10
TOTAL WAKTU MAKSIMUM		740 menit	10 hari

Lampiran 2. Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat Instalasi Karantina Ikan Kelas C

No.	Uraian	Waktu	Hari kerja
1.	Penerimaan permohonan, dokumen persyaratan administrasi dan registrasi.	15 menit	1
2.	Surat permohonan dan dokumen persyaratan administrasi diterima dan disposisi.	5 menit	1
3.	Penerbitan Surat Perintah verifikasi kelengkapan, kesesuaian, keabsahan dokumen yang dipersyaratkan, analisis dan evaluasi dokumen mutu karantina ikan serta penyampaian ke Petugas Verifikasi/ PHPI.	10 menit	1
4.	Pelaksanaan verifikasi kelengkapan, kesesuaian, keabsahan dokumen yang dipersyaratkan, analisis dan evaluasi dokumen mutu karantina ikan serta penerbitan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta rekomendasinya.	120 menit	2
5.	Penerbitan Surat Perintah Penilaian IKI dan penyampaian ke PHPI.	5 menit	2
6.	Pelaksanaan penilaian IKI dan penerbitan laporan hasil penilaian (LHP).	480 menit	3-4
7.	Penyampaian LHP oleh Tim Penilai	5 menit	5
8.	Penerbitan Rekomendasi Hasil Penilaian IKI oleh Kepala UPT BKIPM	10 menit	5
9.	Penyampaian hasil rekomendasi penilaian IKI	5 menit	5
10.	Penerbitan Sertifikat kelas C	10 menit	6
TOTAL WAKTU MAKSIMUM		665 menit	6 hari

Lampiran 3. Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat Cara Karantina Ikan Yang Baik

No.	Uraian	Waktu	Hari kerja
1.	Penerimaan permohonan, dokumen persyaratan administrasi dan registrasi.	5 menit	1
2.	Surat permohonan dan dokumen persyaratan administrasi diterima dan disposisi.	5 menit	1
3.	Penerbitan Surat Perintah Verifikasi Dokumen dan penyampaian ke Petugas Verifikasi/PHPI.	5 menit	1
4.	Pelaksanaan verifikasi kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dan penerbitan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP).	10 menit	1
5.	LHP dokumen diterima, diverifikasi dan disposisi.	5 menit	1
6.	Penerbitan Surat Perintah Analisis dan Evaluasi Dokumen Mutu Karantina Ikan dan penyampaian ke PHPI.	10 menit	1
7.	Pelaksanaan analisis dan evaluasi dokumen mutu karantina ikan dan penerbitan rekomendasi.	120 menit	1 - 2
8.	Rekomendasi analisis dan evaluasi dokumen mutu karantina ikan diterima, diverifikasi dan disposisi.	15 menit	2
9.	Penerbitan Surat Perintah Penilaian IKI dan penyampaian ke PHPI.	5 menit	2
10.	Pelaksanaan penilaian IKI dan penerbitan laporan hasil penilaian (LHP).	480 menit	3 - 4

No.	Uraian	Waktu	Hari kerja
11.	Penyampaian LHP oleh Tim Penilai dan penerbitan rekomendasi hasil penilaian.	10 menit	5
12.	Penyampaian Rekomendasi Hasil Penilaian IKI.	5 menit	5
13.	Rekomendasi Hasil Penilaian IKI diterima dan disposisi.	5 menit	6
14.	Penerbitan Surat Perintah Verifikasi Rekomendasi Penilaian IKI dan penyampaian ke petugas verifikasi/PHPI.	5 menit	6
15.	Pelaksanaan Verifikasi Rekomendasi Penilaian IKI serta penerbitan Laporan Hasil Verifikasi (LHV).	10 menit	6
16.	Pengiriman/ penyampaian rekomendasi penilaian IKI ke BKIPM melalui Puskari (untuk IKI kelas A dan B)	10 menit	7
17	Penyiapan Pakta Integritas dan penyampaian kepada perorangan/ badan hukum	5 menit	10
18	Penerbitan Pakta Integritas Integritas yang ditandatangani perorangan/ badan hukum dan Kepala UPT BKIPM	5 menit	10
19	Penerbitan Surat Perintah Monitoring Penerapan Dokumen Mutu dan Survailan HPIK/ HPI tertentu dan penyampaian ke PHPI	5 menit	10
20	Pelaksanaan Monitoring Penerapan Dokumen Mutu dan Survailan HPIK/ HPI tertentu dan penerbitan laporan hasil monitoring dan survailan	480 menit	10
21	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Laboratoris dan Penyampaian ke PHPI	5 menit	11

No.	Uraian	Waktu	Hari kerja
22	Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratoris dan Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU)	900 menit	11 - 15
23	Laporan hasil monitoring penerapan dokumen mutu, survailan dan LHU diterima, dievaluasi dan disposisi	30 menit	15
24	Penerbitan surat perintah inspeksi IKI, dan penyampaian ke Inspektur Karantina Ikan	10 menit	15
25	Pelaksanaan inspeksi IKI perorangan/ badan hukum dan penerbitan Laporan Hasil Inspeksi (LHI)	960 menit	15 -16
26	Pengiriman/ penyampaian rekomendasi hasil inspeksi IKI	5 menit	16
27	Rekomendasi Hasil Inspeksi IKI diterima dan disposisi	10 menit	16
28	Penerbitan Surat Perintah Verifikasi Rekomendasi Hasil Inspeksi IKI dan penyampaian ke petugas verifikasi/ PHPI	10 menit	16
29	Pelaksanaan verifikasi Rekomendasi Hasil Inspeksi IKI serta penerbitan Laporan Hasil Verifikasi	10 menit	16
30	Penerbitan Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (Kelas A atau B)	10 menit	17 - 20
TOTAL WAKTU MAKSIMUM		3150 menit	20 hari

Lampiran 4. Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat Cara Karantina Ikan Yang Baik Kelas C

No.	Uraian	Waktu	Hari kerja
1.	Penerimaan permohonan, dokumen persyaratan administrasi dan registrasi.	15 menit	1
2.	Surat permohonan dan dokumen persyaratan administrasi diterima dan disposisi.	5 menit	1
3.	Penerbitan Surat Perintah verifikasi kelengkapan, kesesuaian, keabsahan dokumen yang dipersyaratkan, analisis dan evaluasi dokumen mutu karantina ikan serta penyampaian ke Petugas Verifikasi/ PHPI.	10 menit	1
4.	Pelaksanaan verifikasi kelengkapan, kesesuaian, keabsahan dokumen yang dipersyaratkan, analisis dan evaluasi dokumen mutu karantina ikan serta penerbitan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta rekomendasinya.	120 menit	2
5.	Penerbitan Surat Perintah Penilaian IKI dan penyampaian ke PHPI.	5 menit	2
6.	Pelaksanaan penilaian IKI dan penerbitan laporan hasil penilaian (LHP).	480 menit	3-4
7.	Penyampaian LHP oleh Tim Penilai	5 menit	5
8.	Penerbitan Rekomendasi Hasil Penilaian IKI oleh Kepala UPT BKIPM	10 menit	5
9.	Penyampaian hasil rekomendasi penilaian IKI	5 menit	5
10.	Penerbitan Sertifikat kelas C	10 menit	6
11.	Penyiapan Pakta Integritas dan penyampaian kepada perorangan/ badan hukum	5 menit	10
12.	Penerbitan Pakta Integritas yang ditandatangani perorangan/ badan hukum dan Kepala UPT BKIPM	5 menit	10

No.	Uraian	Waktu	Hari kerja
13.	Penerbitan Surat Perintah Monitoring Penerapan Dokumen Mutu dan Survailan HPIK/ HPI tertentu dan penyampaian ke PHPI	10 menit	10
14.	Pelaksanaan Monitoring Penerapan Dokumen Mutu dan Survailan HPIK/ HPI tertentu dan penerbitan laporan hasil monitoring dan survailan serta penyampaian hasil Monitoring Penerapan Dokumen Mutu dan Survailan HPIK/ HPI tertentu	480 menit	11
15.	Penerbitank Surat Perintah Pemeriksaan Laboratoris dan Penyampaian ke PHPI	10 menit	11
16.	Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratoris dan Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU)	900 menit	11 - 15
17.	Penyampaian Laporan Hasil Uji (LHU)	5 menit	15
18.	Pelaksanaan evaluasi Laporan hasil monitoring penerapan dokumen mutu, survailan dan LHU serta penyampaian laporannya	30 menit	15
19.	Penerbitan surat perintah inspeksi IKI, dan penyampaian ke Inspektur Karantina Ikan	10 menit	15
20.	Pelaksanaan inspeksi IKI perorangan/ badan hukum dan penerbitan Laporan Hasil Inspeksi (LHI)	960 menit	15 -16
21.	Penerbitan Rekomendasi Hasil Inspeksi oleh Kepala UPT BKIPM	10 menit	16
22.	Penerbitan Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (untuk CKIB C)	10 menit	17
TOTAL WAKTU MAKSIMUM		3100 menit	17 Hari